



PERPUSTAKAAN  
BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
KEMENTERIAN AGAMA  
*LITERATE TO MODERATE*



# KLIPING DIGITAL

## AGAMA DAN KEAGAMAAN

KAMIS | 29 FEBRUARI 2024





## Segera Ajak Pemuka Agama Bahas Wacana KUA

WACANA Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan, termasuk menjadi tempat pernikahan berbagai agama, dinilai masih belum jelas dan belum disosialisasikan kepada para pemuka agama.

“Sampai sekarang wacana itu belum disosialisasikan, saya belum tahu persis isinya, maka tidak bisa menanggapi,” ungkap Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Dia berharap Kementerian Agama dapat

mengundang para pemimpin komunitas agama untuk membicarakan hal itu secara bersama terlebih dahulu sebelum mengesahkannya.

“Siapa tahu ada yang menyangkut ajaran iman yang berbeda-beda yang harus diperhitungkan. Supaya maksud baik ini tidak menimbulkan masalah baru,” tegas Ignatius Suharyo.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rafani Achyar, juga menyebut belum mendapat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait dengan wacana itu.

“Kami tentu kaget karena tidak pernah disosialisasikan. Tidak ada rencana sebelumnya, tiba-tiba mengeluarkan rencana kebijakan seperti itu. Ini saya yakin akan menimbulkan kontroversi nantinya,” ungkapnya.

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai bahwa soal KUA harus didukung oleh regulasi dan relevansi. Menurutnya, jika agama lain dalam hal pernikahan mengharuskan keterlibatan negara, dalam hal ini melibatkan KUA, maka tentu hal tersebut harus ditindaklanjuti melalui revisi terhadap regulasi yang ada

seperti UU Perkawinan.

“Bagi agama non-Islam, tentang pernikahan ini kan hanya melalui catatan sipil. Bagi kami, tentu kami akan kembalikan kepada masyarakat sendiri,” kata Ace.

### Langkah koordinasi

Kementerian Agama bersama Kementerian Dalam Negeri akan segera berkoordinasi guna melakukan penyesuaian maupun penataan regulasi mengenai usulan KUA untuk semua agama.

“Kita akan segera berkomunikasi dengan Kemendagri yang selama ini melaksana-

kan pencatatan sipil nikah untuk non-Islam,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin.

Selama ini, pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam berada di bawah kewenangan KUA Ditjen Bimas Islam. Sebaliknya yang non-Islam berada di kantor pencatatan sipil.

Menurut Kamaruddin, setelah berkoordinasi dengan Kemendagri, nantinya ada pilihan: tetap berada di bawah Bimas Islam atau akan terpisah menjadi teknis baru. (Des/AN/Ant/X-6)



## KEKERASAN

# Pesantren Ramah Anak Terus Disosialisasikan

JAKARTA, KOMPAS — Pesantren Al Hanifiyyah di Kediri yang menjadi lokasi penganiayaan salah seorang santri hingga tewas dipastikan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau NSP dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kemenag tidak bisa mengintervensi pesantren tersebut.

"Kami tidak diperbolehkan ikut serta dalam urusan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (dalam kasus di pondok pesantren Al Hanifiyyah)," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Ali Ramdhani, Rabu (28/2/2024).

Sebelumnya, Kepolisian Resor (Polres) Kediri Kota telah menetapkan empat santri sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan yang berujung tewasnya salah seorang santri di Pondok Pesantren Al-Hanifiyyah. Semua tersangka yang juga berstatus santri di pesantren itu, saat ini telah ditahan.

Menurut Ali, Kemenag terus melakukan upaya sosialisasi

untuk mencegah terjadinya kasus perundungan ataupun kekerasan seksual di pesantren. Bahkan, upaya sosialisasi tersebut juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dana Anak-anak PBB (Unicef).

Tahun lalu, Kemenag bersama Unicef meluncurkan Program Pesantren Ramah Anak dengan salah satu percontohan di Pondok Pesantren Sultan Hassanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Program ini akan diterapkan di 23 pesantren replikasi yang tersebar di lima kabupaten/kota di Sulsel, yakni Makassar, Maros, Gowa, Bone, dan Wajo.

Pesantren Ramah Anak menjadi strategi dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak atau para santri. Selama menempuh pendidikan, setiap pondok pesantren yang didukung tenaga pendidik profesional harus mem-

berikan pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang optimal sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan fisik maupun psikis.

Selain itu, Kemenag juga telah memiliki buku panduan pesantren ramah anak yang disusun bersama Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA). Proses sosialisasi berbasis buku panduan ini dilakukan di lebih dari 39.000 pesantren yang terdaftar di Kemenag.

Kemudian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga mengatur agar pondok atau asrama harus memperhatikan aspek keamanan bagi para santri. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pihak pondok pesantren perlu mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam institusi pendidikan keagamaan tersebut.

Di samping kekerasan fisik ataupun perundungan, Ali juga menyoroti pentingnya semua pihak mencegah terjadinya ke-

kerasan seksual dalam pondok pesantren. Untuk mengantisipasi hal ini, Kemenag telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kemenag.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono Abdul Ghafur meminta orangtua untuk lebih selektif dalam memilih pondok pesantren bagi anak-anaknya. Salah satu yang harus dicermati mulai dari perizinan atau NSP hingga sanad atau periwayatan hadis dari para pengurus pondok pesantren tersebut.

Memeriksa NSP dari pondok pesantren, lanjut Waryono, sangat penting karena pesantren yang berizin akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari Kemenag.

Saat ini tercatat lebih dari 39.000 pesantren telah memiliki izin dan terdaftar di Kemenag. (MTK)





## **Semua Pesantren yang Beroperasi Seharusnya Penuhi Standar LPKRA**

TINDAK kekerasan di lingkungan pesantren terhadap santri junior masih saja terjadi. Kasus terbaru yang menjadi perhatian masyarakat ialah adanya kasus penganiayaan santri oleh kakak kelasnya di Pondok Pesantren Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang berujung tewasnya korban.

Menanggapi hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta semua pondok pesantren di seluruh Indonesia terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) agar dibina dan diawasi serta memenuhi standar perlindungan anak. "Semua ponpes harus terdaftar sebagai lembaga yang bisa dibina dan diawasi," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar, kemarin.

Kementerian PPPA juga menyoroti tentang pentingnya setiap satuan pendidikan, termasuk pondok pesantren, untuk memenuhi standar lembaga perlindungan khusus ramah anak (LPKRA).

Sebelumnya, pihak Kemenag menyatakan bahwa Pesantren Haniffiyah di Kediri tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki nomor statistik pesantren (NSP) dari Kemenag. "Dia itu bukan pesantren, tetapi mengaku dirinya pesantren. Dia pesantren yang tidak diakui negara," ujar Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani di Jakarta. (Ant/H-1)



### Perayaan Galungan di Lombok



KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

**Umat Hindu** memadati area dalam dan luar Pura Melanting Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk bersembahyang dalam rangka merayakan Hari Raya Galungan, Rabu (28/2/2024). Hari Raya Galungan yang dirayakan setiap 210 hari tersebut diharapkan jadi momentum memperkuat kebersamaan satu sama lain.





ANTARA/APRILLIO AKBAR

**SEMBAHYANG GALUNGAN DI JAKARTA:** Umat Hindu melaksanakan persembahyangan Hari Raya Galungan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta, kemarin. Hari Raya Galungan merupakan hari merayakan kemenangan kebaikan (*dharma*) melawan kejahatan (*adharma*).



MI/AGUS UTANTORO

**PROSESI GALUNGAN:** Umat Hindu mengikuti prosesi Galungan di Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin. Hari Raya Galungan dimaknai sebagai hari kemenangan bagi kebaikan melawan keburukan.





## Pengurus Masjid Diminta Jadi Penggerak Zakat

SEMARANG - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji, meminta kepada pengurus masjid



SM/Slamet Daryono

**SAMPAIKAN SAMBUTAN :** Ketua Baznas Jateng KH Ahmad Darodji menyampaikan sambutan dalam acara pentasharufan zakat kepada mustahik asnaf sabilillah lembaga keagamaan, di Aula Kantor Baznas Jateng, Jl Menteri Supeno Semarang, Rabu (28/2).

dan mushala menjadi penggerak zakat di lingkungannya masing-masing.

Hal itu ia sampaikan di hadapan pengurus lembaga keagamaan, saat pembekalan dan pentasharufan zakat kepada mustahik asnaf sabilillah lembaga keagamaan, di Aula Kantor Baznas Jateng, Jl Menteri Supeno Semarang, Rabu (28/2).

Karena itu, Kiai Darodji, menganjurkan kepada setiap masjid untuk membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) yang disahkan oleh Baznas. Sebab, dengan membentuk UPZ, maka masjid boleh secara undang-undang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari umat Islam.

Terlebih, menurutnya, Ramadan segera tiba. Waktu itu, banyak orang membayar zakat. Ini momen

tepat untuk menggalang dana umat melalui zakat, infak, dan sedekah.

"Masjid-masjid itu hendaknya segera membentuk unit pengumpul zakat. Karena unit pengumpul zakat ini sah untuk menerima zakat dari masyarakat dan membagikannya kepada masyarakat yang berhak," terangnya.

Setiap pengurus diminta membangkitkan masyarakat untuk berzakat.

Khatib misalnya, kata dia, saat berkhotbah menggerakkan jamaah untuk zakat.

Kemudian ustadz TPQ atau pondok pesantren, juga mendorong para murid beserta walinya berzakat.

"Kalau bisa menunaikan zakat dengan betul, insya Allah kesejahteraan masyarakat bisa ditumbuhkan. Tidak selamanya meneri-

ma, tapi juga saatnya memberi," katanya.

### Kewajiban

Darodji menyampaikan, zakat itu tumbuh dari yang berkewajiban untuk mengeluarkannya. Menurutnya, bagi yang berpenghasilan Rp 6.500.000 sudah berkewajiban mengeluarkan zakat seperempat puluhnya.

"Kalau pegawai negeri, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2014, semuanya ke Baznas. Bagi masyarakat tidak semuanya harus ke Baznas, tapi masyarakat harus digerakkan untuk berzakat. Semua lembaga punya potensi. Masjid punya potensi, madrasah punya potensi untuk jelaskan kepada masyarakat tentang zakat," katanya.

Sementara itu, untuk dana yang ditasharufkan kepada mustahik

asnaf sabilillah lembaga keagamaan tahap II tahun 2024 ini, yaitu sebesar Rp 1,76 miliar.

Adapun lembaga yang menerima sebanyak 79 lembaga. Hal itu terdiri atas 19 masjid, 13 mushala, 5 TPQ, 10 pondok pesantren, 20 madrasah, dan 3 lembaga lain.

"Karena ini adalah zakat, maka jangan sampai ada potongan sedikit pun. Kami meminta apa yang diterima dari Baznas, semua harus sampai kepada yang berhak menerimanya," katanya.

Ia berpesan kepada umat agar menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya. Sebab, menurutnya, selain untuk membantu orang yang membutuhkan, zakat atau sedekah akan menjadi perisai mencegah terjadinya musibah. Selain itu, bentuk ibadah yang bernilai pahala. (sdy-22)





## Hadapi Krisis Iklim

# Aksi Menteri Nurbaya Diperkuat Fatwa MUI

**Aksi nyata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menghadapi tantangan krisis iklim konsisten dilakukan. Upaya tersebut diharapkan makin kuat setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).**

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, kinerja aksi iklim ini tidak main-main. Indonesia terus menunjukkan aksi nyata kepada internasional.

"Upaya kita dalam emisi pun terus dilakukan secara sistematis dalam koridor tata kelola karbon," ujar Siti dikutip dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Dia mengatakan, penting bagi Indonesia menunjukkan tekadnya kepada dunia internasional untuk menghadapi persoalan lingkungan dan hutan. Langkah yang diambil Indonesia harus jelas dan berbobot.

"Bagaimana cara mengambil keputusan, mengurai masalah dan memformulasikannya menjadi aksi," tuturnya.

Menurutnya, berbagai *workshop* juga dijalankan KLHK, sehingga program aksi iklim bisa direncanakan secara detail.

Selain untuk implementasi aksi iklim yang sistematis, juga menjadi *showcase* yang menunjukkan kerja aksi iklim, khususnya dalam kerangka kerja FoLU Netsink 2030 di Indonesia agar berjalan secara terarah dalam rambu-rambu carbon *governance*.

Dalam pelaksanaan aksi iklim Pemerintah Pusat juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Bahkan melibatkan lembaga swadaya masyarakat atau Non Governmental Organization (NGO) dan akademisi.

"Bagi internasional, *governance* itu penting, begitu juga bagi Indonesia. Maka *workshop* dia-

dakan supaya kerja kita itu sistematis. Dengan begitu, mereka tahu kita tidak main-main dengan dana internasional," tegas Siti.

Politisi Partai NasDem ini menilai, rangkaian langkah kerja Pemerintah Norwegia melalui Pelaksanaan Result Based Contribution (RBC) merupakan pengakuan sejalan dengan prestasi Indonesia dalam penurunan emisi GRK dari REDD+ dalam framework FoLU Netsink 2030.

Dia menegaskan, hingga saat ini untuk penanganan iklim khususnya Folu Netsink 2030 Indonesia masih sangat besar didukung oleh kekuatan dana Pemerintah dan dari aktivitas masyarakat.

"Terutama FoLU yang telah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari menyangkut interaksi manusia Indonesia dengan alamnya," katanya.

Langkah KLHK dalam menghadapi krisis iklim diharapkan semakin kuat setelah terbitnya Fatwa MUI Nomor 86

Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fatwa tersebut telah diumumkan KLHK melalui website tegas Siti.

Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Hayu Prabowo mengatakan, ketentuan dalam fatwa tersebut untuk mencegah terjadinya krisis iklim.

Ulama sepakat mengharamkan segala bentuk tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam, deforestasi (penggundulan hutan) dan pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim. Sebab itu, kinerja mengatasi krisis iklim harus semakin gencar dijalankan.

"Fatwa ini juga mewajibkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mengurangi jejak karbon yang bukan kebutuhan pokok serta melakukan upaya transisi energi yang berkeadilan," katanya.

Dia menerangkan, dalam proses penyusunan fatwa ini, ko-

misi fatwa bersama lembaga pengusul melakukan kunjungan lapangan.

Dari kunjungan itu dikumpulkan bukti empiris mengenai penyebab dan dampak perubahan iklim di lapangan.

Selain itu, dalam proses pembahasan fatwa, sudah dilakukan focus group discussion dengan berbagai pemangku kepentingan. Baik dari Pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat yang secara aktif memberikan masukan serta rujukan ilmiah.

Dalam mengendalikan perubahan iklim tersebut tidak mungkin hanya dilakukan Pemerintah Pusat. Dia mendorong adanya penguatan usaha kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Sementara, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin mengakui upaya Indonesia yang sangat mengesankan dalam upaya penguatan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. ■ JAR



HELLO AMBASSADOR

Duta Besar India Untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty

# Bahas Kerja Sama Pendidikan & Teknologi Digital Dengan PBNU

DUTA Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty bertamu ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Senin (26/2/2024). Kunjungan ini demi memperkuat kerja sama kedua negara, khususnya di bidang pendidikan dan teknologi digital.

Dubes Chakravorty diterima Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU H Amin Said Husni, Wakil

Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Ahmad Ginanjar Sya'ban dan Wasekjen Mas'ud Saleh.

"Saya berterima kasih kepada Ketua PBNU yang telah menerima saya. Pertemuan itu sangat produktif dan kami berbagi pandangan-pandangan yang dapat mempererat hubungan kedua negara," ujar Dubes Chakravorty, dikutip dari web PBNU, Selasa (27/2/2024).

Dalam kunjungannya ini, dia mengaku bisa bertukar pikiran

mengenai banyak hal dengan tokoh NU, dengan fokus pembicaraan mengenai upaya peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, teknologi dan digitalisasi.

"Kami bekerja demi kepentingan nasional dan kami bekerja dengan siapa pun yang percaya pada perdamaian dan keamanan global," terang Dubes yang pernah bertugas di Peru itu.

"Kami yakin kemajuan Indonesia bisa membuatnya berperan lebih besar di dunia, dan akan

memberikan manfaat bagi kita semua," sambungnya.

Dubes Chakravorty juga menekankan pentingnya kerja sama antara kedua negara dalam mencapai tujuan sebagai negara maju. Seperti Indonesia emas pada 2045, sementara Negeri Bollywood itu punya tujuan menjadikan India sebagai negara maju pada 2047. "Itu hanya akan tercapai jika India dan Indonesia bekerja sama," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan, In-

dia, Indonesia dan negara-negara di belahan bumi selatan harus memiliki pendirian sendiri dan tidak mudah dipengaruhi negara besar.

"Bersama kita perjuangkan hak suara dan berpendapat agar bisa berkembang sesuai harapan yang kita impikan," tutupnya. ■ DAY

Dubes India Shri Sandeep Chakravorty (kiri) bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (26/2/2024).



PBNU





PERPUSTAKAAN  
BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
KEMENTERIAN AGAMA  
*LITERATE TO MODERATE*

**UNTUK MENCARI KLIPING LAINNYA  
BISA DIAKSES MELALUI LINK BERIKUT**

**[bit.ly/kliping-digital](https://bit.ly/kliping-digital)**

